

PERUMUSAN, FORMULASI, DAN ADOPSI KEBIJAKAN
PENDIDIKANHaditsa Qur'ani Nurhakim¹, Arif Rahman Hakim², Basuki³, Mamat Rahmat⁴,
Supiana⁵, Qiqi Yulianti Zakiah⁶¹Universitas Islam Bandung, Indonesia^{2,3,4,5,6} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, IndonesiaEmail : haditsa.qurani@unisba.ac.id¹, arifrahmanalhakim1@gmail.com²,
basuki1029384756@gmail.com³, rahmatheni2@gmail.com⁴, supiana@uinsgd.ac.id⁵,
qiqiyuliatizaqiah@uinsgd.ac.id⁶

Received: October 2025

Accepted: October 2025

Published: October 2025

Abstract :

Educational policy serves as a strategic foundation in national development, as it directly influences the quality of human resources produced. This article comprehensively examines three key aspects within the realm of public policy, namely problem formulation, educational policy formulation, and policy adoption. The method employed in this study is a literature review. In the problem formulation stage, emphasis is placed on the importance of accurately and systematically identifying issues so that the resulting policies are relevant to societal needs and capable of addressing contemporary challenges. Furthermore, policy formulation is analyzed by considering the role of internal and external factors, the application of policy theories, as well as the contributions of various actors involved in the process of drafting and establishing educational policies. In terms of policy adoption, this article reviews best practices from countries with excellent education systems, such as Finland, Japan, and South Korea, while also exploring the potential for their implementation in the Indonesian context. The integration of these three aspects is expected to foster educational policies that are more adaptive, democratic, inclusive, and oriented toward the sustainable improvement of human resource quality.

Keywords : Education Policy; Problem Formulation; Formulation; Adoption; Indonesia**Abstrak :**

Kebijakan pendidikan merupakan fondasi strategis dalam pembangunan bangsa, karena secara langsung memengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Artikel ini mengkaji secara komprehensif tiga aspek utama dalam ranah kebijakan publik, yaitu perumusan masalah kebijakan, formulasi kebijakan pendidikan, dan adopsi kebijakan pendidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Pada tahap perumusan masalah, penekanan diberikan pada pentingnya identifikasi isu secara tepat dan sistematis agar kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan zaman. Selanjutnya, formulasi kebijakan dianalisis dengan memperhatikan peran faktor internal dan eksternal, penggunaan teori kebijakan, serta kontribusi aktor-aktor yang berperan dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pendidikan. Pada aspek adopsi kebijakan, artikel ini meninjau praktik terbaik dari negara-negara dengan sistem pendidikan unggul seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan, sekaligus mengkaji kemungkinan implementasinya dalam konteks pendidikan Indonesia. Integrasi ketiga aspek tersebut diharapkan dapat melahirkan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, demokratis, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan; Perumusan Masalah; Formulasi; Adopsi; Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa karena menentukan kualitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Namun, kualitas pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari segi input, proses, maupun output. Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan capaian Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional pada literasi membaca, matematika, dan sains. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara alokasi anggaran pendidikan yang besar dengan kualitas hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, memahami siklus kebijakan pendidikan dari perumusan masalah, formulasi, hingga adopsi kebijakan dari negara lain sangat penting untuk memperkuat pembangunan pendidikan nasional (Sussanti & Reza, 2022).

Kajian kebijakan publik pada dasarnya berupaya menelaah berbagai teori sekaligus proses yang berlangsung dalam ranah kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik selalu berkaitan erat dengan dinamika pembentukannya. Oleh sebab itu, salah satu sasaran utama dalam studi kebijakan publik adalah menganalisis tahapan demi tahapan dalam proses perumusan kebijakan hingga menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan tertentu (M.L. Lowe., 2022).

Dalam konteks pendidikan, isu dan permasalahan tidak pernah habis untuk dikaji, terutama di Indonesia yang masih memerlukan banyak pembaruan, khususnya dalam hal perumusan kebijakan pendidikan. Hal ini penting karena keberlangsungan dan masa depan bangsa sangat ditentukan oleh formulasi kebijakan pendidikan yang diterapkan (Patton, Sawicki, & Clark, 2015).

Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah melalui adopsi kebijakan, yakni mengambil kebijakan dari negara lain untuk kemudian diterapkan di suatu negara tertentu. Namun demikian, penerapan adopsi kebijakan harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat kebijakan itu dilaksanakan (Amirudin, Supiana, & Zaqiah, 2021). Pertimbangan ini menjadi prinsip pokok agar kebijakan yang diadopsi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima. Dengan cara ini, adopsi kebijakan pendidikan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta

taraf hidup masyarakat (Mourato, 2006).

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter, kompetensi, dan daya saing bangsa. Dalam konteks Indonesia, sistem pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan keadaban sosial (Damanik & Muhammad, 2025). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan memiliki posisi yang sangat menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan pendidikan nasional.

Namun, dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang berkembang pesat menuntut kebijakan pendidikan untuk senantiasa adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Tantangan seperti kesenjangan mutu antarwilayah, digitalisasi pendidikan, ketimpangan akses, serta rendahnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja menuntut adanya kebijakan yang terarah, berbasis data, dan partisipatif. Dalam konteks inilah, kajian terhadap proses kebijakan pendidikan menjadi sangat penting, terutama pada tiga aspek krusial: perumusan, formulasi, dan adopsi kebijakan. Ketiga aspek ini menentukan sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab persoalan pendidikan secara komprehensif (Albina & Afiva, 2024).

Aspek perumusan kebijakan pendidikan merupakan tahap awal yang menentukan arah strategis pengambilan keputusan. Pada tahap ini, permasalahan diidentifikasi, data dikumpulkan, dan berbagai alternatif solusi dipertimbangkan. Kelemahan dalam perumusan sering kali menyebabkan kebijakan tidak berpijak pada realitas lapangan dan gagal menjawab kebutuhan aktual masyarakat (Yulidawati, vevi Mokoginta, & Awad, 2024). Selanjutnya, formulasi kebijakan pendidikan berperan dalam merancang rancangan kebijakan yang konkret dan operasional. Tahapan ini menuntut keterlibatan aktor-aktor strategis, baik dari pemerintah, akademisi, maupun masyarakat. Tanpa formulasi yang matang, kebijakan berpotensi tidak efektif dalam implementasi. Adapun adopsi kebijakan pendidikan menjadi tahap krusial yang menentukan legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan dan diformulasikan. Tantangan dalam tahap adopsi sering kali muncul akibat tarik-menarik kepentingan politik dan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan di berbagai tingkatan pemerintahan (Jazirotnunada & Abidin, 2023).

Urgensi kajian terhadap tiga aspek kebijakan ini semakin meningkat di tengah tuntutan reformasi sistem pendidikan nasional. Meskipun berbagai kebijakan telah diluncurkan seperti Kurikulum Merdeka, digitalisasi pendidikan, dan program pemerataan guru masih ditemukan kesenjangan antara kebijakan yang ideal di tingkat pusat dan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian dalam memahami secara mendalam bagaimana proses perumusan, formulasi, dan adopsi kebijakan pendidikan di Indonesia berlangsung serta sejauh mana ketiga aspek tersebut berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan pendidikan nasional (Fahmi, Putu Sudira, & Lucky Al Hafzy, 2022). Kajian komprehensif terhadap ketiga tahapan ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kebijakan pendidikan dan membuka ruang bagi pengembangan kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada penelaahan konseptual dan teoritis terhadap proses kebijakan pendidikan, bukan pada pengumpulan data lapangan secara langsung (Sugiono, 2017). Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber akademik yang relevan secara mendalam guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tiga aspek utama kebijakan pendidikan (Creswell, 2014).

Sumber data penelitian ini bersifat sekunder, meliputi: Dokumen kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan pedoman teknis pendidikan nasional, Literatur akademik berupa buku teks, jurnal ilmiah, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu terkait kebijakan pendidikan dan Laporan dan dokumen resmi dari lembaga seperti Kementerian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, UNESCO, dan OECD yang relevan dengan kebijakan pendidikan Indonesia.

Teknik Analisis Data. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tiga tahap: Reduksi data yaitu menyeleksi dan menelaah informasi dari berbagai sumber yang berhubungan langsung dengan proses perumusan, formulasi, dan adopsi kebijakan pendidikan, Kategorisasi data sehingga hasil kajian literatur dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama: Aspek Perumusan: mencakup identifikasi masalah, penetapan agenda, dan analisis kebijakan, Aspek Formulasi: meliputi perancangan alternatif kebijakan, konsultasi publik,

dan penyusunan rancangan akhir kebijakan dan Aspek Adopsi: mencakup proses pengesahan, legitimasi politik, dan penerimaan sosial terhadap kebijakan. Terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi seperti menganalisis hubungan antar aspek untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia.

Dengan desain penelitian ini, diharapkan hasil kajian mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu kebijakan pendidikan dan menawarkan rekomendasi praktis bagi para pengambil kebijakan agar proses perumusan, formulasi, dan adopsi kebijakan pendidikan di Indonesia semakin efektif, partisipatif, dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Masalah Kebijakan

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan pemerintah dan diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah keputusan atau kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga maupun pejabat pemerintah. Ia mengemukakan lima implikasi utama dari konsep kebijakan publik tersebut, yaitu: kebijakan publik selalu diarahkan pada tujuan tertentu; kebijakan publik terdiri atas rangkaian tindakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan; kebijakan publik merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan akan regulasi dalam bidang tertentu; kebijakan publik mencerminkan realitas tindakan pemerintah, bukan sekadar rencana atau keinginan; dan kebijakan publik dapat berwujud tindakan aktif maupun pasif dalam menghadapi suatu persoalan (Nurhakim, Sanusi, Nur'aeni, & Muhammad, 2024).

Perumusan masalah kebijakan adalah tahap awal dalam siklus kebijakan publik. Anderson menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan berorientasi tujuan yang ditetapkan pemerintah. Agar suatu isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, ia harus disepakati banyak pihak, memiliki prospek solusi, sejalan dengan pertimbangan politik, dan konsisten dengan ideologi negara. Proses ini menuntut pendekatan yang hati-hati, karena kesalahan dalam mendefinisikan masalah akan melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian, perumusan masalah kebijakan menuntut analisis yang bersifat holistik, partisipatif, dan kontekstual (Davies, Nutley, & Walter, 2010).

Tahap awal dalam proses kebijakan publik adalah merumuskan masalah,

yang merupakan langkah paling mendasar. Agar kebijakan yang dirancang tepat sasaran, permasalahan publik harus diidentifikasi dengan benar. Kebijakan publik pada hakikatnya dirancang untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, tahap ini perlu dilakukan secara cermat, sebab kesalahan dalam mendefinisikan isu akan berdampak pada ketidaktepatan kebijakan yang dihasilkan. Rushefky menegaskan bahwa sering kali kegagalan dalam kebijakan lebih disebabkan oleh ketidakmampuan menemukan solusi yang sesuai dibandingkan dengan menemukan masalah yang tepat (Wina Sanjaya, 2011). Suatu permasalahan dapat dikategorikan sebagai isu kebijakan apabila memenuhi empat syarat, yaitu: memperoleh kesepakatan dari berbagai pihak, memiliki peluang untuk diselesaikan, selaras dengan pertimbangan politik, dan konsisten dengan ideologi yang berlaku. Kemudian agenda kebijakan dipahami sebagai daftar isu atau persoalan yang perlu ditangani oleh pemerintah. Proses penyusunan agenda merupakan upaya untuk mengangkat suatu masalah agar mendapat perhatian dari pengambil keputusan (Vincent Truff Andreas & Budi Prabowo, 2023). Agenda kebijakan dapat dianalogikan dengan topik diskusi atau daftar pembahasan dalam sebuah rapat besar yang melibatkan para pejabat pemerintah.. Agenda kebijakan ini berperan sebagai pengingat bahwa dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan waktu, para pembuat kebijakan harus memberikan perhatian pada beberapa isu saja yang paling prioritas (Fischer, 2003).

Penelitian ini berpijak pada teori kebijakan publik klasik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dan William Dunn, yang menekankan bahwa kebijakan adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah dalam menjawab masalah publik. Dalam konteks Indonesia, teori ini diterapkan untuk memahami bagaimana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespons permasalahan pendidikan nasional melalui kebijakan yang bersifat dinamis.

Teori proses kebijakan ini diaplikasikan untuk menelaah: Perumusan: bagaimana data pendidikan nasional, seperti hasil Asesmen Nasional, digunakan sebagai dasar penyusunan agenda kebijakan, Formulasi: bagaimana rancangan kebijakan diuji coba secara terbatas untuk menilai efektivitasnya dan Adopsi: bagaimana dukungan publik, politik, dan kelembagaan memengaruhi implementasi kebijakan di sekolah.

Pendekatan ini relevan bagi Indonesia karena menggambarkan perlunya integrasi antara bukti empiris dan konteks sosial dalam setiap tahap kebijakan

pendidikan. Hasil analisis diharapkan dapat memperkuat desain kebijakan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan pendidikan nasional.

Terdapat sejumlah faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi perubahan suatu isu menjadi agenda kebijakan (Lindblom, 2018). Faktor internal meliputi: gaya kepemimpinan politik, visi dan misi partai yang mendukung pemerintah, rekam jejak keberhasilan pemerintahan sebelumnya, serta dinamika perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari berbagai faktor tersebut, penstrukturan masalah menjadi aspek yang sangat menentukan apakah sebuah isu layak masuk ke dalam agenda kebijakan. Oleh karena itu, masalah perlu dirumuskan secara sistematis, sederhana, terarah, dan mampu menyentuh kepentingan publik (Nurmalisa, Sunyono, Yulianti, & Sinaga, 2023).

Sementara itu, faktor eksternal yang berperan antara lain: perubahan kondisi ekonomi, pemberitaan di media massa, opini publik, dinamika keputusan pengadilan dan hubungan internasional, perkembangan teknologi, serta perubahan struktur demografi (Istianah, Mazid, Hakim, & Susanti, 2021).

Tahapan Perumusan Masalah

Untuk memahami pentingnya perspektif ideologi, pandangan dunia, dan mitos sosial dalam mendefinisikan masalah substantif, dapat dicontohkan melalui beragam definisi mengenai kemiskinan. Kemiskinan bisa dipandang sebagai akibat dari kondisi yang tidak disengaja atau tidak dapat dihindari dalam masyarakat, hasil dari tindakan manusia yang tidak bermoral, maupun kelemahan yang terdapat dalam diri orang miskin itu sendiri (Raiffa & Schlaifer, 2000). Definisi-definisi ini sesungguhnya sarat dengan unsur ideologi, mitos, maupun cara pandang tertentu yang hanya menyoroti sebagian aspek dari realitas masalah. Pandangan tersebut ada yang bermanfaat, namun pada saat yang sama dapat menyesatkan (Badrudin & Shidiq, 2022).

Fenomena serupa juga terlihat dalam isu kebijakan pendidikan, seperti kesenjangan akses pendidikan atau kualitas guru. Misalnya, kesenjangan akses pendidikan dapat didefinisikan secara berbeda tergantung pada ideologi yang mendasarinya. Dalam perspektif liberal, masalah kesenjangan dipandang sebagai akibat dari kurangnya kesempatan yang merata bagi individu untuk berkompetisi secara adil. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan biasanya berupa peningkatan akses dan kebebasan individu untuk memilih lembaga pendidikan. Sementara dalam perspektif sosialis atau strukturalis, kesenjangan akses dianggap sebagai hasil dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang melekat

dalam sistem, sehingga solusinya menekankan redistribusi sumber daya dan kebijakan afirmatif bagi kelompok terpinggirkan (Faqihuddin & Nugraha, 2023).

Demikian pula, masalah kualitas guru sering kali didefinisikan berbeda sesuai ideologi yang digunakan. Dalam pendekatan teknokratis, kualitas guru diukur melalui indikator kuantitatif seperti hasil tes kompetensi atau kinerja akademik siswa. Namun, dalam pendekatan humanistik atau progresif, kualitas guru justru dipahami melalui kemampuan guru membangun relasi empatik, memfasilitasi berpikir kritis, dan menumbuhkan nilai kemanusiaan. Artinya, ideologi pendidikan memengaruhi apa yang dianggap sebagai “masalah” dan bagaimana “solusi” dirancang (Makky, 2018).

Setelah masalah substantif didefinisikan, tahap berikutnya adalah merumuskan masalah formal yang lebih spesifik dan terperinci. Proses peralihan dari masalah substantif menuju masalah formal dilakukan melalui spesifikasi masalah, yang biasanya berbentuk representasi atau model matematis. Tantangan muncul ketika hubungan antara masalah substantif yang kompleks dengan model formal yang dirumuskan ternyata lemah. Sebagian besar metode matematis kurang cocok diterapkan untuk masalah yang sulit didefinisikan, sebab tujuan utama dalam tahap ini bukan sekadar menemukan solusi matematis yang tepat, melainkan mendeskripsikan secara jelas hakikat masalah itu sendiri.

Formulasi Kebijakan Pendidikan

Formulasi dapat diartikan sebagai proses perumusan, sedangkan kebijakan merupakan sekumpulan konsep dan prinsip yang menjadi pedoman utama sekaligus dasar perencanaan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kepemimpinan, maupun tindakan tertentu (baik dalam pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya). Kebijakan juga dapat dipahami sebagai pernyataan mengenai cita-cita, tujuan, asas, atau maksud yang berfungsi sebagai arah dan acuan manajerial dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Formulasi kebijakan pendidikan merupakan proses perumusan konsep, asas, dan pedoman dasar dalam perencanaan kebijakan. Faktor-faktor yang memengaruhi formulasi antara lain tekanan eksternal, kebiasaan lama, karakteristik pribadi pembuat kebijakan, kelompok kepentingan, dan pengalaman masa lalu. Beberapa teori digunakan dalam formulasi, di antaranya: Teori Inkrementalis, Teori Demokratis, Teori Strategis, Teori Pilihan Publik, dan Teori Sistem. Aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan pendidikan meliputi legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, dan kelompok

kepentingan (Nurjanah, 2019).

Formulasi kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai tahapan penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di bidang pendidikan. Pada tahap ini, berbagai konsep, asas, serta pedoman dasar dirancang untuk menentukan arah pembangunan pendidikan nasional. Proses tersebut tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perumusan kebijakan pendidikan sering kali dihadapkan pada tantangan koordinasi antarlevel pemerintahan, keterbatasan data, serta tarik-menarik kepentingan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan kelompok masyarakat sipil. Meskipun secara normatif kebijakan disusun melalui mekanisme rasional dan sistematis, praktiknya kerap kali bersifat kompromistis untuk mengakomodasi kepentingan politik dan sosial yang beragam. Hal inilah yang menyebabkan kebijakan pendidikan di Indonesia tidak selalu sejalan dengan teori ideal tentang formulasi kebijakan publik.

Dalam praktiknya, proses perumusan dan penetapan kebijakan pendidikan di Indonesia tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ada berbagai faktor yang turut memengaruhi arah serta isi kebijakan tersebut. Pertama, tekanan eksternal menjadi salah satu faktor penting. Arus globalisasi, tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif, serta dorongan dari lembaga internasional seperti UNESCO dan OECD sering kali memengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional. Misalnya, penerapan Kurikulum 2013 (K-13) dan Kurikulum Merdeka merupakan respons terhadap kebutuhan penguasaan kompetensi global abad ke-21 yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis.

Kedua, warisan kebijakan sebelumnya juga memiliki pengaruh besar. Banyak keputusan dalam bidang pendidikan yang masih mengacu pada pola dan kebiasaan lama, termasuk sistem birokrasi yang sentralistik. Meskipun era reformasi membawa semangat desentralisasi dan otonomi daerah, dalam praktiknya pengambilan keputusan di sektor pendidikan sering kali tetap terpusat di pemerintah pusat.

Ketiga, karakter pembuat keputusan turut menentukan arah kebijakan. Latar belakang, pengalaman, dan pandangan pribadi pejabat publik yang terlibat dalam proses kebijakan dapat berpengaruh besar. Tidak jarang keputusan diambil berdasarkan pertimbangan politik atau preferensi individu, bukan hasil kajian akademik atau penelitian yang komprehensif.

Keempat, kelompok kepentingan dan partisipasi publik memainkan

peran tersendiri. Organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sering memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan pendidikan. Namun, meskipun ada upaya untuk melibatkan publik, partisipasi tersebut sering kali masih bersifat formalitas dan belum benar-benar mencerminkan keterlibatan yang mendalam dari berbagai lapisan masyarakat.

Kelima, pengalaman masa lalu dan evaluasi kebijakan juga memengaruhi kebijakan yang baru. Sering kali, perubahan kebijakan dilakukan sebagai bentuk reaksi terhadap kegagalan kebijakan sebelumnya, bukan berdasarkan hasil evaluasi yang menyeluruh. Contohnya, pergantian kurikulum yang terjadi terlalu cepat cenderung lebih dipicu oleh pertimbangan politis daripada hasil analisis empiris yang mendalam.

Teori dan Implementasinya dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia

Beberapa teori formulasi kebijakan publik dapat digunakan untuk memahami realitas kebijakan pendidikan di Indonesia: Kesatu Teori Inkrementalis, Pendekatan ini terlihat jelas dalam kebijakan kurikulum nasional yang sering kali hanya mengalami penyempurnaan bertahap, seperti peralihan dari KTSP ke K-13 dan kemudian ke Kurikulum Merdeka. Kebijakan berjalan secara evolusioner, bukan revolusioner. Kedua Teori Demokratis yaitu prinsip partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pendidikan sudah diatur dalam berbagai regulasi. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masih terbatas pada forum konsultasi publik tanpa pengaruh signifikan terhadap substansi keputusan ketiga Teori Strategis, Pemerintah mulai menerapkan pendekatan strategis dalam perencanaan pendidikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan peta jalan pendidikan 2020–2035. Meski demikian, implementasi sering terkendala oleh perbedaan visi antarinstansi dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Keempat Teori Pilihan Publik, dalam konteks Indonesia, teori ini masih belum optimal diterapkan. Walaupun kebijakan seperti Program Indonesia Pintar atau BOS berupaya melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat, mekanisme pengambilan keputusan tetap bersifat top-down. Kelima, Teori Sistem Pendekatan sistem tampak dalam struktur kebijakan pendidikan nasional, di mana input berupa aspirasi masyarakat, data pendidikan, dan rekomendasi akademisi diolah melalui proses birokrasi hingga menghasilkan keputusan formal seperti undang-undang dan peraturan menteri. Namun, dalam praktiknya, proses umpan balik (feedback) masih lemah, sehingga kebijakan sering gagal menyesuaikan diri dengan perubahan di

lapangan.

Aktor yang Terlibat dalam Proses Perumusan

Proses perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia melibatkan berbagai aktor dengan peran, kepentingan, dan pengaruh yang berbeda-beda. Setiap aktor memiliki kontribusi tertentu dalam membentuk arah serta isi kebijakan pendidikan nasional. Pertama, lembaga legislatif memegang peran penting dalam proses legislasi. Mereka bertanggung jawab untuk membahas dan mengesahkan undang-undang di bidang pendidikan serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, legislatif berperan sebagai pengendali dan penyeimbang terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kedua, lembaga eksekutif melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) menjadi pelaksana utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan teknis. Kementerian ini bertugas merancang program-program pendidikan, menyusun kurikulum, mengatur standar mutu pendidikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga, administrator pendidikan di tingkat daerah dan sekolah berperan sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Mereka bertugas menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen para administrator ini.

Keempat, partai politik dan kelompok kepentingan juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Melalui jalur politik dan advokasi publik, mereka dapat memengaruhi prioritas kebijakan, baik dalam hal alokasi anggaran, isu-isu pendidikan tertentu, maupun penentuan pejabat strategis di sektor pendidikan.

Kelima, perguruan tinggi dan kalangan akademisi memberikan kontribusi penting dalam bentuk pemikiran konseptual dan hasil penelitian. Mereka berperan dalam penyusunan naskah akademik, analisis kebijakan, serta memberikan rekomendasi berbasis data dan teori yang dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan.

Keenam, organisasi masyarakat dan tokoh publik berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat serta pengontrol moral terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Mereka berperan dalam mengawasi agar

kebijakan pendidikan tetap berpihak pada kepentingan publik dan tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan.

Analisis

Jika dibandingkan dengan teori-teori formulasi kebijakan, praktik di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antara idealitas dan realitas. Pendekatan inkrementalis paling dominan, sementara penerapan teori demokratis dan pilihan publik masih lemah karena keterbatasan ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pendidikan di masa depan perlu diarahkan pada model partisipatif dan berbasis data (*evidence-based policy*) agar keputusan yang diambil lebih rasional, adil, dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Adopsi kebijakan adalah proses penerimaan dan penerapan suatu kebijakan pendidikan oleh pihak-pihak terkait (pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat). Proses ini bukan hanya sekadar menerima, tetapi juga melibatkan pemahaman, penyesuaian, serta pelaksanaan kebijakan sesuai konteks lokal. Menurut (Dunn, 2015), adopsi kebijakan terjadi ketika alternatif solusi yang ditawarkan pemerintah dipilih dan dilembagakan dalam sistem pendidikan.

Konteks Politik dan Regulasi serta dukungan pemerintah, peraturan, dan kepentingan politik, Sosial-Budaya nilai, norma, dan kearifan lokal yang mendukung atau menolak kebijakan, Ekonomi dan Sumber Daya, ketersediaan dana, sarana prasarana, serta SDM. Kesiapan Institusi Pendidikan kapasitas sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Partisipasi Stakeholder dukungan masyarakat, orang tua, dan organisasi pendidikan.

Top-Down, kebijakan dibuat pemerintah pusat, lalu diimplementasikan ke bawah (contoh: Kurikulum Merdeka). Bottom-Up: kebijakan muncul dari kebutuhan lokal sekolah/masyarakat, lalu diadopsi oleh pemerintah, Hybrid: kombinasi keduanya, ada arahan dari pusat tapi juga ruang inovasi lokal. Tahapan adopsi kebijakan pendidikan yaitu Identifikasi Masalah Pendidikan, misalnya rendahnya literasi siswa, Formulasi Kebijakan, penyusunan kebijakan alternatif oleh pemerintah/ahli dan Adopsi Kebijakan, penerimaan oleh pemangku kepentingan (legislasi, regulasi, atau kesepakatan bersama) kemudian Implementasi, penerapan kebijakan di sekolah, guru, kurikulum, atau sistem evaluasi lakukan Evaluasi, mengukur efektivitas kebijakan, lalu dilakukan revisi jika perlu.

Contoh adopsi kebijakan pendidikan di Indonesia, Kurikulum Merdeka (2022) diadopsi oleh sekolah secara bertahap, Program Indonesia Pintar (PIP) bantuan dana pendidikan agar akses pendidikan lebih merata, program Sekolah Penggerak sebagai inovasi kebijakan untuk meningkatkan mutu sekolah dan terakhir Full Day School sempat diadopsi sebagian sekolah, namun mengalami resistensi karena faktor sosial budaya.

Perbedaan konteks lokal (desa vs kota), Resistensi dari guru/masyarakat karena perubahan mendadak, Keterbatasan dana dan sarana dan Lemahnya monitoring dan evaluasi, menjadi tantangan adopsi kebijakan pendidikan. Sedangkan strategi sukses adopsi kebijakan pendidikan, melibatkan guru dan masyarakat sejak tahap perencanaan, Memberikan sosialisasi dan pelatihan yang memadai, Menyediakan dukungan dana dan infrastruktur, Melakukan evaluasi berkala berbasis data dan Menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan lokal. Adopsi kebijakan pendidikan adalah proses penting agar kebijakan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar terimplementasi di sekolah dan berdampak pada kualitas pendidikan. Keberhasilan adopsi dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan yang efektif tidak hanya lahir dari analisis masalah yang tepat, tetapi juga dari keterpaduan antara proses perumusan, formulasi, dan adopsi kebijakan. Pertama, perumusan kebijakan pendidikan menuntut kemampuan untuk mengidentifikasi masalah mendasar, menetapkan prioritas, serta merumuskan tujuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional. Tahap ini menjadi landasan konseptual yang menentukan arah seluruh proses kebijakan.

Kedua, formulasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan faktor internal seperti kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta faktor eksternal seperti perkembangan global, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial-budaya. Partisipasi berbagai aktor pemerintah, akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Ketiga, adopsi kebijakan pendidikan dari negara-negara maju dapat memperkaya strategi nasional dengan ide-ide inovatif dan praktik terbaik, asalkan melalui proses seleksi dan adaptasi yang sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Proses adopsi yang kritis dan selektif akan memperkuat daya saing pendidikan nasional di kancah global.

Implikasinya, kebijakan pendidikan nasional perlu diarahkan pada model pengambilan keputusan yang berbasis data, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan. Sinergi antara perumusan, formulasi, dan adopsi kebijakan akan memperkuat sistem pendidikan Indonesia dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

Saran untuk penelitian lanjutan, diperlukan kajian lebih mendalam terkait evaluasi implementasi kebijakan pendidikan di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian tersebut penting untuk menilai efektivitas, hambatan, dan dampak nyata dari kebijakan yang telah diadopsi, sehingga dapat menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan pendidikan nasional di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Albina, M., & Afiva, N. (2024). Konsep Dasar Pendidikan Multikultural. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 340–344.
- Amirudin, J., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2021). Perumusan Masalah Kebijakan. *Ad-Man-Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 25–43.
- Badruddin, M., & Shidiq, S. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Siswa Melalui Keteladanan Guru Di Mtsn 1 Bogor. *Qiro'ah; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(2), 84–96.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanik, F. H. S., & Muhammad, G. (2025). Sociology Of Education Analysis On The Deep Learning Approach To Teaching. *Journal Of Sumatera Sociological Indicators*, 4(1), 348–357.
- Davies, H., Nutley, S., & Walter, I. (2010). Using Evidence: How Social Research Could Be Better Used To Improve Public Service Performance. *Connecting Knowledge And Performance In Public Services: From Knowing To Doing*, 199–225.
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Fahmi, M. N., Putu Sudira, & Lucky Al Hafzy. (2022). Quantum Teaching Learning Model Assisted Interactive Media: Does It Affect Students' Higher Order Thinking Skill? *Indonesian Journal Of Educational Research And Review*, 5(3), 479–490. <https://doi.org/10.23887/Ijerr.V5i3.54286>
- Faqihuddin, A., & Nugraha, R. H. (2023). Model Pendidikan Muslim Millennial Parents Dalam Membina Akhlak Generasi Alpha. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 7785–7799. <https://doi.org/10.31004/obsesi.V7i6.4884>
- Fischer, F. (2003). *Reframing Public Policy: Discursive Politics And Deliberative Practices*. Oxford University Press.
- Istianah, A., Mazid, S., Hakim, S., & Susanti, R. (2021). Integrasi Nilai-Nilai

- Pancasila Untuk Membangun Karakter Pelajar Pancasila Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Gatranusantara*, 19(1), 62–70.
- Jazirotnunada, J., & Abidin, M. (2023). Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Di Smp Negeri 2 Turen. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 7(1), 137–146.
- Lindblom, C. (2018). The Science Of “Muddling Through.” In *Classic Readings In Urban Planning* (Pp. 31–40). Routledge.
- M.L. Lowe. (2022). Environmental Influences On Early Language And Literacy Development. *Journal Social Policy And Educational Implications. Journal Advanced In Child Development And Behavior*.
- Makky, A. (2018). *Kritik Ideologi Radikal*, Kediri: Kediri: Lirboyo Press.
- Mourato, S. (2006). *Cost-Benefit Analysis And The Environment*. Paris: Oecd.
- Nurhakim, H. Q., Sanusi, I., Nur'aeni, U., & Muhammad, G. (2024). Implementasi Profil Pelajar Pancasila Guna Pencegahan Tindak Perundungan Siswa. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 8(2), 166–178.
- Nurjanah, M. (2019). Teori Keluarga : Studi Literatur. In *Teori Keluarga* (Vol. 1).
- Nurmalisa, Y., Sunyono, S., Yulianti, D., & Sinaga, R. M. (2023). An Integrative Review: Application Of Digital Learning Media To Developing Learning Styles Preference. *International Journal Of Information And Education Technology*, 13(1), 187–194. <https://doi.org/10.18178/Ijiet.2023.13.1.1795>
- Patton, C., Sawicki, D., & Clark, J. (2015). *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning*. Routledge.
- Raiffa, H., & Schlaifer, R. (2000). *Applied Statistical Decision Theory*. John Wiley & Sons.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Sussanti, S., & Reza, F. (2022). Adopsi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(2), 164–174.
- Vincent Truff Andreas, & Budi Prabowo. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Kota Surabaya Melalui Program Pengabdian Oleh Divisi Keuangan Peln Surabaya. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 31–38. <https://doi.org/10.55606/Jppmi.V2i3.429>
- Wina Sanjaya. (2011). *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Pt Fajar Interpratama.
- Yulidawati, R., Vevi Mokoginta, S. M., & Awad, A. (2024). Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (Mgmp) Pai-Bp Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Dan Komptensi Profesional Guru Pai-Bp Tingkat Sma Kabupaten Banjar. *Tarbawi*, 12(2), 51–64.